

# Jurnal **iNoVaSi**

**IKATAN MAHASISWA PASCASARJANA DAN ALUMNI GORONTALO (IMPAG) BANDUNG**

- TATA CARA PELAKSANAAN ADAT ISTIADAT PADA TINGKAT PERALIHAN  
SEPANJANG HIDUP INDIVIDU DI LINGKUNGAN MASYARAKAT GORONTALO  
**ABDULKADIR B. NAMBO**
- POLA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI  
PEDESAAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
**USMAN MOONTI**
- MENELUSURI PARADIGMA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
**ASNA ANETA**
- KONTEKSTUALISASI NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DALAM MENUNJANG  
SEMANGAT MEMBANGUN DIKALANGAN MASYARAKAT DAERAH  
**RAUF HATU**
- PERSEPEKTIF ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA ABAD 21  
**SUKARMAN KAMIHI**  
DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
*(Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*  
**YULIANIO KADJI**
- OPTIMALISASI POTENSI SUMBER DAYA DAERAH  
**LISDA L. ASI**
- PENETAPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG ADIL DALAM PROSES  
PERLAKUAN TERHADAP PEKERJA/BURUH  
**RAFLIN HINELO**
- KONSEPSI TENTANG PERANAN PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM  
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA APARATUR NEGARA  
**ZUCHRI ABDUSSAMAD**
- MANAJEMEN STRATEGIK PELAYANAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI  
**HASNIAH**
- PERANAN KOMPENSASI MONETER SEBAGAI TOLAK UKUR KEPUASAN KERJA  
KARYAWAN DALAM SUATU PERUSAHAAN  
**DENI BUDIANA**
- PERTUBASE GRAVITASI ALAM SEMESTA  
**M. YUSUF & MURSALIN**
- PENENTUAN UKURAN RISIKO (NILAI VAR) SAHAM  
**ZAINAL A. KOEMADJI**
- MODEL INFLASI KOSMOLOGI  
**M. YUSUF**



Jurnal Inovasi	Volume 1	No. 4	Hal. 1-117	Bandung Desember 2004	ISSN 1693-9034
-------------------	----------	-------	------------	-----------------------------	-------------------

# Jurnal **iNoVasi**

IKATAN MAHASISWA PASCASARJANA DAN ALUMNI GORONTALO (IMPAG) BANDUNG

TATA CARA PELAKSANAAN ADAT ISTIADAT PADA TINGKAT PERALIHAN SEPANJANG HIDUP INDIVIDU DI LINGKUNGAN MASYARAKAT GORONTALO

ABDULKADIR B. NAMBO

POLA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

USMAN MOONTI

MENELUSURI PARADIGMA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

ASNA ANETA

KONTEKSTUALISASI NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DALAM MENUNJANG SEMANGAT MEMBANGUN DIKALANGAN MASYARAKAT DAERAH

RAUF HATU

PERSEPEKTIF ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA ABAD 21

SUKARMAN KAMULI

DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK

*(Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*

YULIANTO KADJI

OPTIMALISASI POTENSI SUMBER DAYA DAERAH

LISDA L. ASI

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG ADIL DALAM PROSES PERLAKUAN TERHADAP PEKERJA/BURUH

RAFLIN HINELO

KONSEPSI TENTANG PERANAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA APARATUR NEGARA

ZUCHRI ABDUSSAMAD

MANAJEMEN STRATEGIK PELAYANAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI

HASNIAH

PERANAN KOMPENSASI MONETER SEBAGAI TOLAK UKUR KEPUASAN KERJA KARYAWAN DALAM SUATU PERUSAHAAN

DENI BUDIANA

PERTUBASI GRAVITASI ALAM SEMESTA

M.YUSUF & MURSALIN

PENENTUAN UKURAN RISIKO (NILAI VAR) SAHAM

ZAINAL A KOEMADJI

MODEL INFLASI KOSMOLOGI

M.YUSUF



IMPAG BANDUNG

Jurnal Inovasi	Volume 1	No. 4	Hal. 1-117	Bandung Desember 2004	ISSN 1693-9034
----------------	----------	-------	------------	-----------------------	----------------

**PENASEHAT**

Prof. Dr. H. Nani Tuloli.  
Prof. Dr. H. Mansoer Pateda.  
Prof. Dr. H. Jassin Tuloli.  
Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd.  
Dr. Fachrudin Z. Olilingo, SE., M.Si.  
Dr. Gaffar, M.Si.

**PENANGGUNG JAWAB**

Ketua Ikatan Mahasiswa Pascasarjana dan Alumni Gorontalo (IMPAG) Bandung.

**KETUA DEWAN PENYUNTING**

Abd. Rahman Pakaya.

**PENYUNTING PELAKSANA**

Yulianto Kadji, Sukarman Kamuli, Supardi Nani,  
Syarwani Canon, Ridwan Ibrahim, M. Yusuf.

**ALAMAT PENERBIT/REDAKSI**

Jalan Kubang Sari VII No. 107/153A RT. 06/ RW. 06 Kelurahan Sekeloa  
Kecamatan Cobleng Kota Bandung 40133.  
Telp. (62-22) 2533015.  
e-mail: jinovasi@hotmail.com, jinovasi@math.net.

**PENERBIT**

IKATAN MAHASISWA PASCASARJANA  
DAN ALUMNI GORONTALO (IMPAG) BANDUNG.

Terbit empat kali dalam satu tahun. (*Maret, Juni, September, Desember*).

## PENGNTAR REDAKSI

Patut diyukuri kepada Yang Maha Besar Tuhan, bahwa Tim pengelola dapat menerbitkan kembali Jurnal Inovasi Volume 1 Nomor 4, Desember 2004. Jurnal ini seolah menghentak kesunyian pikir yang mesti diorbitkan sebagai sebuah pengawal motivasi berkarya dalam nuansa akademis bagi yang peduli dengan aktivitas keilmuannya.

Oleh karena itulah, maka Pengelola sadar bahwa untuk mengorbitkan sebuah jurnal ilmiah seharusnya pula didukung oleh komitmen dan konsistensi ilmiah oleh para praktisi keilmuan yang sadar atau tidak mengarahkan kita, bahwa setiap jurnal selalu menghargai variasi dan heterogenitas keilmuan yang ditampilkan secara kolektif dan utuh dengan tetap mengedepankan orisinalitas ilmiah yang menjadi tanggungjawab masing-masing penulis yang secara spesifik mendalami ilmu itu sendiri. Dan pada edisi kali ini direfresentasikan oleh para akademisi baik dari Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Langlangbuana Bandung maupun Universitas Haluoleo Kendari.

Harapan bersama, semoga bermanfaat ketika dimanfaatkan.

**Ketua Penyunting**

# Pola Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Usman Moonti

Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Gorontalo.

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu realitas sosial ekonomi yang senantiasa ada dalam setiap masyarakat, bahkan membentuk sub-kultur tersendiri. Kemiskinan dapat dianggap bermasalah, bilamana realitas tersebut dihubungkan dengan *cultural focus* berdasarkan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Dengan menempatkan cita-cita nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kemiskinan di pedesaan merupakan suatu masalah serius yang perlu segera ditanggulangi.

Apabila diasumsikan bahwa faktor keadaan geografis melalui proses alamiah menyediakan jumlah, mutu dan jenis serta pola penyebaran sumber daya alam, merupakan hal yang bersifat pasif dalam kaitannya dengan perubahan, maka dalam batas-batas tertentu dapat didomestikasi melalui penggunaan teknologi baru. Bila demikian, maka penyebab kemiskinan diduga bersumber dari sistem sosial ekonomi pedesaan; bukan dari kondisi sumber daya alam. Ada dua komponen sistem yang berkaitan langsung dengan kemiskinan, yaitu sumber daya manusia dan lembaga sosial ekonomi. Sebagai komponen dari suatu sistem yang sama, keduanya saling mempengaruhi dalam menentukan dinamika sistem sosial ekonomi pedesaan, termasuk aspek keragaan ekonomi sebagai salah satu aspeknya. Keragaan ekonomi merupakan hasil interaksi kedua komponen tersebut, yakni dengan segala kemampuan yang dimiliki manusia (individu/kelompok) berusaha mendayagunakan sumber daya alam untuk berbagai kebutuhan menurut norma sosial yang berlaku.

Sesuai dengan keadaan umum pola penyebaran desa-desa miskin dan wilayah penyebaran budaya masyarakat pedesaan, bila dihubungkan dengan masalah-masalah umum yang dihadapi selama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan khususnya di bidang ekonomi, maka pendekatan terpadu dalam menanggulangi kemiskinan perlu dirumuskan kembali dalam Model Komunitas Sosial Ekonomi. Model ini penulis kembangkan dari konsep komunitas yang dikemukakan oleh Ferdinand Tönnies (dalam Belling dan Totten, 1985), dengan memasukkan unsur kesatuan wilayah usaha dan pemukiman. Secara konseptual model komunitas sosial ekonomi, dalam hal ini diartikan sebagai strategi pembangunan pedesaan terpadu yang berwawasan lingkungan, bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan dan perubahan sosial ekonomi secara bertahap dari agraris menuju agraris industri (agroadustri).

## Model Komunitas Sosial Ekonomi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, dihubungkan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan, upaya-upaya pengentasan yang telah dilakukan, dan perspektif mengenai peluang dan kendala

yang dihadapi, maka berikut ini dikemukakan suatu kerangka konseptual sebagai salah satu alternatif pemecahan, yaitu:

- a. Bila suatu masyarakat pedesaan terdiri atas bermacam-macam unit komunitas budaya, dan bila komunitas-komunitas tersebut tersebar menurut wilayah kebudayaan yang terkait dengan wilayah geografis tertentu, maka desa-desa yang ada di kawasan pedesaan tersebut lebih bersifat genealogis dari pada teritorial.
- b. Lembaga-lembaga sosial tradisional di desa-desa yang tercakup dalam suatu komunitas budaya lebih homogen dalam struktur dan fungsinya, demikian pula jenisnya. Warga komunitas yang sama dan berdekatan geografis menyebabkan komunitas-komunitas tersebut memiliki pola aktivitas ekonomi yang relatif sama.
- c. Dinamika kelembagaan sosial ekonomi tradisional mengalami *cultural lag* akibat mekanisme sistem sosial ekonomi pedesaan sebagai suatu keseluruhan. Hal ini ditandai dengan ketimpangan fungsi kelembagaan sosial ekonomi dalam mengorganisasikan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya yang senantiasa bertambah banyak dan semakin kompleks.
- d. Pembentukan kelembagaan baru, antara lain misalnya Wilayah Unit Desa atau Wilud, yang didukung dengan Catur Sarana Unit Desa (BRI unit desa, KUD, penyuluhan dan kios) pada hakekatnya juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kepincangan sistem kelembagaan sosial ekonomi lokal, di samping tujuan pokoknya untuk membangun sistem pertanian modern. Walaupun program ini belum sepenuhnya memobilisasi semua sumber daya di pedesaan, akan tetapi dari segi sosiologis, setidaknya-tidaknya telah mengarahkan gerak perubahan sosial ekonomi pada tahap transisi.

## Pola Pengembangan Kelembagaan

Pola pengembangan lembaga sosial ekonomi pedesaan dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain: struktur dan fungsi kelembagaan, sarana dasar aktivitas dan pola partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan seperti berikut:

### (a) Struktur dan Fungsi Kelembagaan

1. Lembaga sosial ekonomi yang dimaksud, baik dalam arti norma maupun sebagai wadah, adalah merupakan perpaduan semua norma dan aktivitas sosial ekonomi pada suatu komunitas. Lembaga ini merupakan penyatuan gerak langkah antara warga komunitas (desa-desa tertinggal), pemerintah dan badan sosial atau ekonomi yang terkait dalam pembangunan pedesaan guna mengentaskan kemiskinan.
2. Struktur dan fungsi kelembagaan diatur sedemikian sehingga mampu memobilisasi semua sumberdaya, baik yang tersedia secara lokal maupun yang didukung dari luar. Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip organisasi yang modern, status dan peranan lembaga-lembaga lokal yang ada dalam komunitas perlu direkrut untuk dipadukan dengan konsep-konsep kelembagaan baru yang akan dibentuk oleh pemerintah.
3. Segi keterwakilan dari pihak-pihak yang terlibat perlu diwujudkan dalam struktur kelembagaan, baik dilihat dari hirarki maupun depanementasi struktur.

4. Hirarki dan departementasi struktur perlu dibuat sesederhana mungkin namun dapat mewadahi semua aktivitas sosial ekonomi dan dapat menggerakkan semua potensi pendukung berdasarkan realitas sosial.
5. Fungsi-fungsi pokok lembaga tersebut, adalah (a) pengatur pola hubungan kerja antara para pelaku ekonomi pedesaan, baik antara kelompok-kelompok anggota komunitas, maupun dengan komunitas lainnya; (b) menghimpun kekuatan untuk memobilisasi sumber daya secara maksimal untuk mendorong penumbuhan dan perubahan ekonomi; (c) pengatur arus informasi pembangunan; (d) permusyawaratan pembangunan sosial ekonomi pedesaan; (e) memberikan pedoman umum kepada warga komunitas tentang pola aktivitas sosial ekonomi yang lebih baik.

Secara keseluruhan peranan lembaga ini adalah menyelenggarakan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka mengentas kemiskinan dalam suatu komunitas pedesaan. Peranan tersebut dapat dirinci lebih lanjut dalam beberapa hal pokok, yaitu:

1. Merencanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pembangunan sosial ekonomi;
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sosial ekonomi;
3. Mengintegrasikan kelompok-kelompok kerja, lembaga-lembaga lokal dan baru, dan pihak-pihak yang terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, dalam rangka membina dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan petani atau golongan miskin;
5. Menggerakkan prakarsa masyarakat, terutama petani atau golongan miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sebagai langkah bijak untuk menolong dirinya sendiri.
6. Menghimpun dan menyebarkan informasi tentang perkembangan teknologi, keadaan pasar dan informasi pembangunan pada umumnya melalui komunikasi dua arah.
7. Membantu menciptakan kemudahan dalam pengadaan sarana produksi, pengolahan hasil dan pemasaran.

#### (b) Sarana Dasar Aktifitas Kelembagaan

Untuk mewujudkan pelaksanaan peranan/tugas kelembagaan diperlukan beberapa sarana dasar seperti:

1. Pusat aktivitas ekonomi (Koperasi Unit Desa) berperan dalam mengatur dan mengendalikan mekanisme aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa.
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan sosial ekonomi, berperan dalam memahami dan merumuskan permasalahan yang dihadapi; menginventarisasi dan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia dan atau yang diperlukan, memberikan rekomendasi berupa alternatif-alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan; serta merancang pola pengembangan komunitas.

3. Pusat pendidikan dan latihan ketenagakerjaan atau penyuluhan, berperan dalam membina dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang penggunaan teknologi baru dan manajemen pengelola usaha.
4. Pusat Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber daya alam/pertanahan berperan dalam pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah, air dan sumber daya hutan.

#### (c) Pola Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan uraiandiatas, maka pola pengembangan partisipasi masyarakat, terutama petani atau golongan miskin, perlu dirancang dengan pendekatan "sistem"; Dengan pendekatan ini, setidaknya-tidaknya melibatkan beberapa komponen terkait. Di antaranya adalah petani (individu atau kelompok), sistem nilai dan norma, kelembagaan sosial dan agen pembaharu dengan program pembaharuannya. Tinggi rendahnya partisipasi merupakan hasil interaksi antara komponen-komponen tersebut. Masing-masing komponen tersebut mungkin bersifat menarik, mendorong, membatasi bahkan ada yang bersifat menghambat. Pola pengembangan partisipasi yang sesungguhnya adalah membina keharmonisan di antara komponen-komponen tersebut sebagai suatu kesatuan fungsional. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sesuai model yang diajukan, dapat digunakan kerangka konsep berikut ini:

- a. Partisipasi perlu dikembangkan dengan pola profesional, yakni komunitas atau kelompok sasaran diharapkan berperan serta aktif pada berbagai tahap dalam proses aktivitas pembangunan ekonomi, mulai dari perencanaan, sampai pada penilaian dan menikmati hasilnya.
- b. Untuk itu upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan petani atau golongan miskin dalam bidang yang diharapkan partisipasinya adalah merupakan syarat keharusan. Hal ini dimaksudkan bahwa motivasi berpartisipasi merupakan swakarsa untuk menolong diri sendiri dalam mengatasi kesulitan ekonominya.
- c. Program-program pembangunan sosial ekonomi, yang hendak dikembangkan perlu memperhatikan:
  - Kebutuhan petani atau golongan miskin dan masalah-masalah yang sedang dihadapi, sehingga keikutsertaan mereka dalam merencanakan, melaksanakan dan seterusnya, adalah merupakan ikhtiarnya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya.
  - Aspek kelayakan program ditinjau dari kemampuan individu/kelompok yang akan berpartisipasi dan daya dukung potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.
  - Aspek keterwakilan kelompok kepentingan dari pihak-pihak yang berpartisipasi, selain petani atau golongan miskin. Aspek kesesuaian normatif antara nilai yang terkandung dalam program dengan norma-norma pokok yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini diperlukan program yang dapat membawa dampak perubahan sistem norma sosial secara tidak langsung dan dapat membentuk sikap dan perilaku partisipan yang lebih terbuka dalam menerima perubahan.

- d. Keterlibatan agen pembaharu dari luar komunitas hanya sejauh memberikan dorongan dan membantu kemudahan atau panisipasi warga komunitas, dan bukan berperan sebagai pelaku utama pembangunan.
- e. Partisipasi perlu dilakukan melalui lembaga-lembaga yang sudah dikenal atau kelompok-kelompok yang dibentuk atau prakarsa warga komunitas. Dalam hal ini status dan peranan kelembagaan sosial yang telah ada perlu dimanfaatkan.

Pola pengembangan kelembagaan seperti telah dikemukakan itu pada dasarnya dimaksudkan untuk menggerakkan pola partisipasi profesional bagi semua pihak yang diharapkan keikutsertaannya. Terutama bagi kelompok sasaran (petani atau golongan miskin), perlu diberikan peran-peran tertentu yang memungkinkan mereka belajar meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam keikutsertaannya, sehingga kemandirian kelompok sasaran secara efektif terbentuk melalui proses-proses manajemen, di samping melalui upaya pendidikan dan latihan khusus yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut.

### Pengembangan Agribisnis Berskala Kecil

Paling tidak selama masa transisi pertumbuhan ekonomi sekarang ini, kita perlu mengembangkan strategi dan kebijaksanaan yang menempatkan agroindustri (dan agrobisnis) sebagai salah satu sektor unggulan. Sumber-sumber pertumbuhan yang cukup potensial perlu dimanfaatkan untuk memacu tingkat pertumbuhan sesuai dengan sasaran pembangunan ekonomi khususnya bagi masyarakat pedesaan yang memiliki sumberdaya alam yang cukup memadai. Peningkatan pertumbuhan harus sekaligus juga memperbaiki berbagai kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan di masyarakat pedesaan khususnya dan pertumbuhan ekonomi di daerah pada umumnya. Terutama apabila sasaran pembangunan adalah sebagian besar penduduk berpendapatan rendah atau miskin yang terutama terkonsentrasi di sektor pertanian dan pedesaan. Pertumbuhan ekonomi, di satu pihak, dan pertumbuhan *employment* (kesempatan kerja) di sektor pertanian dan pedesaan yang menyerap sebagian besar angkatan kerja di lain pihak, bisa saja sebagai dua sisi mata uang yang sama. Perbaikan kesejahteraan itu sendiri sebagai upaya untuk menekan kesenjangan merupakan sumber pertumbuhan yang cukup potensial. Itulah hakikat dari *demand approach*.

Sumber kemiskinan antara lain adalah adanya bias dalam kebijaksanaan (misalnya Jazairy et.al., 1992). Penduduk miskin (terutama petani kecil dan buruh tani) tidak mampu lagi mempertahankan produktivitas sumberdaya alam yang dikuasainya (terutama lahan). Sebagian mereka yang kurang mampu keluar dari kesulitannya lalu merambah hutan dan menimbulkan kerusakan pada sistem penyangga kehidupan atau merusak lingkungan. Pengembangan agribisnis dan agro-industri yang meningkatkan kesejahteraan penduduk berpendapatan rendah dan tergolong miskin turut membantu dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengurangi ketergantungan lahan.

Pengembangan usaha agribisnis berskala kecil sangat penting dan strategis ditinjau dari berbagai pemikiran di muka. Dewasa ini terdapat lebih dari 32 juta usaha kecil dengan volume usaha kurang dari Rp. 2 milyar rupiah per-tahun: bahkan 90% diantaranya adalah usaha kecil dengan volume usaha kurang

dari Rp. 50 juta rupiah per-tahun. Selanjutnya dari yang 90% tersebut, lebih dari 21,30 juta unit usaha adalah usaha rumah tangga yang bergerak di sektor pertanian. Apabila disertakan dengan keluarganya, maka jumlah pengusaha kecil dengan anggota rumahtangganya bisa mencapai 80% dari penduduk Indonesia; suatu potensi pasar yang sangat besar.

Berbagai masalah dan kendala dihadapi oleh usaha kecil ini namun yang paling mendasar barangkali adalah lemahnya posisi-tawar mereka. Akibatnya mereka hanya bisa berusaha dalam keureman (subsistem) dengan ruang pengambilan keputusan (*decision space*) yang sangat sempit. Oleh Sebab itu, peranan agribisnis berskala kecil ini akan semakin penting dan memiliki keunggulan karena beberapa faktor (lihat Crawford, 1991: halaman 53) sebagai berikut:

1. relatif tidak memerlukan terlalu banyak modal investasi terutama bagi yang bergerak di bidang jasa-jasa;
2. usaha agribisnis kecil dapat bergerak luwes menyesuaikan diri dalam situasi yang berubah karena tidak perlu terhambat oleh persoalan-persoalan birokrasi seperti yang dihadapi oleh perusahaan besar;
3. usaha agribisnis kecil memiliki tenaga-tenaga penjualan dan wirausaha yang tertempa secara alami yang tidak berminat (*vested-interest*) dalam sistem produksi yang sudah ada dan sudah mantap; dan
4. perubahan selera konsumen yang semakin bergeser dari produk-produk tahan lama yang dihasilkan secara massal ke produk-produk yang lebih manusiawi (*personalized goods*) yang lebih tepat untuk dilayani usaha-usaha kecil.

Kalau diperhatikan, maka adanya masalah dan kendala tersebut bermula atau bersumber pada lemahnya posisi-tawar (*bargaining position*) dari usaha kecil. Lemahnya posisi tawar ini bisa terjadi karena: (1) usaha kecil yang terlalu kecil sehingga tidak memiliki atau tidak mampu menyimpan *energy* yang cukup untuk bergerak secara leluasa, lincah dan dengan stamina yang cukup dalam alam bisnisnya, serta (2) kurang terorganisirnya gerakan-gerakan dan kegiatan-kegiatan usaha kecil tersebut khususnya yang berada di pedesaan yang berkaitan langsung dengan masyarakat miskin.

### Koperasi Agribisnis

Faktor lain yang memperlemah posisi-tawar usaha kecil adalah lemahnya kerjasama di antara mereka untuk menghimpun *energy* bersama untuk kekuatan mereka sendiri. Di satu pihak, apabila kita hendak mengembangkan agribisnis kecil maka itu jelas berbasis pertanian dan pedesaan. Selama ini, satu-satunya wadah organisasi formal yang menggalang dan menghimpun *energy* untuk kekuatan di bidang ekonomi (dan sosial) di pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Secara administratif, paling tinggi, wilayah kerja dan lingkup bisnis KUD adalah kecamatan.

Secara vertikal dan utuh, selama ini KUD tidak menangani suatu agribisnis andalan. Padahal, dengan pengalaman menangani tataniaga cengkeh misalnya, terlihat bahwa adanya komoditas andalan ini bisa menjalin kerjasama yang lebih utuh sejak dari tingkat kecamatan hingga nasional, bahkan kalau perlu sampai ke tingkat pasar internasional (ekspor). Dengan kemampuan manajemen dan kapasitas sumberdaya yang dimiliki (*endowment*), yakni terutama manusia

atau tenaga kerja keluarga serta modal, maka skala usaha yang bisa dilakukan oleh usaha kecil terletak dalam suatu rentang tertentu. Ada batas skala minimal dan maksimal. Secara ekonomis efisiensi bisa ditingkatkan dengan skala usaha yang lebih luas (*economics of scale*) melalui pengorganisasian seperti koperasi (Nerlove, 1995) atau melalui program kemitraan.

Dari keseluruhan hal tersebut, nilai tambah yang terbesar yang diciptakan melalui kegiatan agribisnis dan agroindustri justru ada pada sektor hilir (dan hulu) atau *off-farm agribusiness*. Secara administratif, *off-farm agribusiness* ini sebagian besar sudah berada di atas desa atau di luar batas kecamatan. KUD sebagai koperasi primer, yang selama ini satu-satunya wadah kegiatan sosial-ekonomi warga desa, jelas tidak akan mampu meraih secara nyata kegiatan *off-farm agribusiness* tersebut. Seharusnya ini menjadi ajang kerja koperasi sekunder atau koperasi atas desa.

Dengan beberapa alasan tersebut sebenarnya sudah cukup jelas pentingnya integrasi vertikal dan diversifikasi usaha agribisnis kecil melalui pengembangan koperasi pada tingkat sekunder. Dengan begitu, petani gurem/rumahtangga (yang mendominasi usaha kecil) yang dihimpun kekuatannya melalui pengembangan usaha agribisnis kecil bisa meraih sebagian dari nilai tambah yang diciptakan melalui pengembangan agribisnis/agroindustri. Organisasi INKUD, PUSKUD sampai KUD perlu dibenahi lagi untuk menghapus berbagai kesenjangan kerja dan bisnis.

#### Program Agribisnis/Agropolitan di Provinsi Gorontalo

Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, karakteristik penduduk di Provinsi Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Data tahun 2003 menunjukkan 56,27 persen atau sejumlah 184.609 penduduk berusaha di bidang pertanian. Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo yang bekerja menurut lapangan kerja disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Gorontalo tahun 2003

No	Lapangan Pekerjaan	Jumlah Pekerja	Proporsi (%)
1	Pertanian	184.609	56,27
2	Industri	19.116	0,72
3	Pertambangan	3.650	6,90
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	437	0,27
5	Bangunan	7.400	3,76
6	Perdagangan dan Restoran	46.621	14,91
7	Pengangkutan dan	19.934	5,53
8	Komunikasi	3.602	0,49
9	Keuangan, Persewaan	42.873	11,15
	Lain-lain		
Jumlah		328.242	100,00

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2004

Struktur perekonomian Gorontalo sebagaimana halnya daerah lain di Indonesia bertumpu pada sektor pertanian yang umumnya berkaitan langsung dengan masyarakat pedesaan. Menyadari potensi ini khususnya masyarakat yang bekerja di sektor pertanian umumnya bermukim di daerah pedesaan, maka Pemerintah Provinsi lewat kebijakan Gubernur telah mencanangkan Program

Agropolitan sebagai salah satu pilar pembangunan dengan komoditas unggulannya adalah jagung. Pertimbangan jagung ditetapkan sebagai komoditas unggulan didasarkan pada kesesuaian agroekosistem, tradisi dan potensi lahan yang tersedia yaitu sebesar 66.004 Ha.

Sampai dengan tahun 2004 pelaksanaan program agropolitan jagung telah sampai pada program pencapaian produksi 1 juta ton jagung.. Untuk menunjang program ini telah berbagai kegiatan yang ditempuh pemerintah, seperti intensifikasi, ekstensifikasi dan bantuan modal bergulir. Program Agropolitan sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi jagung di Provinsi Gorontalo, khususnya ditujukan dalam upaya peningkatan pendapatan para petani di pedesaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dengan program ini telah terjadi peningkatan produksi dan pendapatan petani jagung. Dampak dari penganan Program Agropolitan jagung telah mendorong peningkatan produktivitas dan produksi jagung di daerah Gorontalo. Data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo (2004), tahun 2001 sampai 2003 menunjukkan bahwa produktivitas jagung secara rata-rata meningkat dari 28,86 kw per Ha menjadi 44,29 kw per Ha, sedangkan produksinya meningkat dari 131.420 ton menjadi 268.685 ton. Dari sisi ekspor berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Provinsi Gorontalo (2004), Program Agropolitan telah mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor jagung. Pada tahun 2001 Volume ekspor jagung adalah 6.300 ton dengan nilai US \$ 613.000, pada tahun 2003 volume ekspornya naik menjadi 18.950 ton dengan nilai US \$ 1.908.900

Dari sisi petani, penganan Program Agropolitan telah mendorong penerimaan dan pendapatan petani khususnya petani di pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan usahatani jagung Program Agropolitan meningkat sebesar 143 % per musim per ha dibandingkan dengan usahatani biasa. Potensi pengembangan program ini dalam menghasilkan komoditas jagung dapat dilihat dari perkembangan indikator usahatannya, yang terdiri dari luas tanam, luas panen, peroduksi dan produktivitasnya. Secara rinci perkembangan indikator usahatani jagung tahun 1999 sampai dengan 2003 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2. Perkembangan Indikator Usahatani Jagung di Provinsi Gorontalo

No	Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (ton)
1	1999	37.664	42.972	26,78	114.941
2	2000	42.977	40.635	29,08	118.181
3	2001	46.278	45.525	28,86	131.420
4	2002	63.330	43.830	30,60	134.121
5	2003	78.500	60.665	44,29	268.685

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2004

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa luas penanaman jagung di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun memperlihatkan peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa motivasi petani dalam berusaha jagung cukup baik. Jika



tahun 2001 dijadikan sebagai tahun dasar Program Agropolitan jagung, rata-rata peningkatan luas penanaman setiap tahun sebelum pelaksanaan Program Agropolitan adalah 4.307 ha. Setelah pencanangan Program Agropolitan rata-rata peningkatan luas tanam menjadi 16.111 ha setiap tahun.

Data indikator usahatani jagung di Provinsi Gorontalo berkaitan dengan keberadaan potensi lahan yang bisa ditanami jagung. Sampai dengan Bulan Juni 2004 potensi lahan yang tersedia di provinsi ini yang dapat ditanami jagung adalah seluas 66.004,30 ha. Luas tanam dan luas panen jagung dapat diidentifikasi dari realisasinya setiap bulan. Berdasarkan data ini dapat dilihat suplay komoditas jagung di Provinsi Gorontalo pada setiap bulannya. Dengan demikian, dengan adanya program agropolitan ini menjadikan petani khususnya petani jagung di pedesaan mengalami peningkatan kesejahteraan hidup dengan tingkat pendapatan yang cukup memadai guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

#### Daftar Pustaka

- Baruwadi, Mahludin. 2004. *Analisis Keberlanjutan Program Agropolitan Jagung di Provinsi Gorontalo*, Bapedalda Provinsi Gorontalo, Gorontalo.
- Belling dan Totten, 1985. *Modernisasi: Masalah Model Pembangunan*. Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Conyers, D. 1987. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hagul, P. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Diterbitkan untuk Yayasan Dian Desa, Yogyakarta.
- Juoro, U. 1985. *Masalah Terdepan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Ndraha, T. 1982. *Metodologi pembangunan Desa*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Siahaan, H.M. 1993. *Dimensi Struktural dan Kultural Kemiskinan Pedesaan* Surabaya Post, Senin, 3 Maret 1993.
- Soekarto, S. 1987. *Beberapa Teori tentang Struktur Masyarakat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekartawi. 1989. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*, Teori dan Aplikasi Rajawali Pers, Jakarta.
- Soewardi, H. 1979. *Modernisasi Produksi Pertanian Khususnya Padi Studi Kasus di Jawa Barat*. Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

## Menelusuri Paradigma Administrasi Pembangunan

Asna Aneta

Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Gorontalo

#### Intisari

Adalah sebuah kebermaknaan ilmiah jika kita berkehendak menelusuri paradigma administrasi pembangunan, walaupun disadari bahwa secara teoritis administrasi pembangunan masih berpijak pada teori administrasi dan teori administrasi Negara, tetapi paling tidak apa yang diungkap berkenaan dengan paradigma administrasi pembangunan menjadi pijakan ilmiah dalam mempelajari tentang filosofis dan substansi dari administrasi pembangunan itu sendiri. Kebermaknaan berikut adalah bahwa administrasi pembangunan sebagai sebuah teori yang dapat mendukung penyelenggaraan administrasi dan proses pembangunan kearah pencapaian tujuan dan dimensi pembangunan.

*Kata Kunci: Paradigma dan Administrasi Pembangunan*

#### Pendahuluan

Kata paradigma berasal dari bahasa latin "paradigma" yang artinya sesuatu sebagai contoh, dan kemudian diberi arti sebagai model atau pola (Haryono Sudriamunawar, 2002:21). Secara umum istilah paradigma digunakan dalam pendekatan sesuatu hal. Bentuk paradigma dapat berupa model, pola atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam perkembangan berikutnya paradigma mempunyai pengertian lebih luas. Paradigma dapat berarti serangkaian pola pikir para ahli yang dikelompokkan dalam masa tertentu, dan dapat pula berarti perodesasi konsep berpikir dalam kurun waktu tertentu yang didasarkan kepada kecenderungan adanya gejala fenomena tertentu

Mustopadidjaja AR. (dalam Haryono Sudriamunawar, 2002:21) mengemukakan bahwa "paradigma adalah sebagai teori dasar atau cara pandang yang fundamental dilandasi nilai-nilai tertentu, dan berisikan teori pokok, konsep, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para teoritis dan praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan baik dalam kaitan pengembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan manusia.

Sebagai suatu kajian yang relatif baru administrasi pembangunan belum mempunyai pijakan yang kokoh terutama teori-teorinya masih menggunakan teori administrasi dan administrasi negara. Oleh karena itu tidak heran apabila paradigma administrasi pembangunan secara jelas dan tegas belum kelihatan pada literatur-literatur yang ada.

Begitu pula halnya dengan definisi administrasi pembangunan tiap ahli mempunyai versi yang berbeda dengan yang lainnya. Untuk memberikan gambaran mengenai definisi administrasi pembangunan berikut ini akan dikutip beberapa pendapat (dalam Haryono Sudriamunawar, 2002:22) sebagai berikut:

#### 1. George F. Gant.

Administrasi Pembangunan sebagai penyempurnaan birokrasi (aparatur pemerintah) dalam menghadapi meningkatnya jumlah, jenis dan kompleksitas

